

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk : Studi Kasus Terhadap Rasio Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah

Mega Tunjung Hapsari^{*1}

Nayu Venda Gracia²

Sayyidah Ulil Hikmah³

Shiva Masayu Sekar Nastiti⁴

Erlis Eka Firnanda⁵

Gita Silfiana Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6} UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*e-mail: megahapsari@uinsatu.ac.id¹, graciavenda162@gmail.com², sayyidah.uh@gmail.com³

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk, dalam pengelolaan keuangan. Kinerja keuangan yang baik merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Nganjuk dengan fokus pada rasiopendapatan dan belanjadaerah. Analisis ini relevan mengingat potensi sumber daya alam di Kabupaten Nganjuk dan meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap pelayanan publik. Dari penelitian sebanyak kasus menunjukkan bahwa analisis derajat desentralisasi sebesar 16% berada dalam kinerja kurang, rasio kemandirian keuangan dengan kinerja rendah sekali, rasio pertumbuhan belanja sebesar 3,46% dalam kinerja yang kurang baik, rata-rata belanja operasional dengan kinerja baik, rata-rata belanja modal sebesar 14,56% dalamkinerjabaik, dan juga rata-rata belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Nganjuk kurang baik karena belanja langsung lebih kecil dari pada belanja tidak langsung. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas pengelolaan keuangan Kabupaten Nganjuk dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah.

Kata kunci: Kinerja keuangan daerah, Pendapatan, Pembelanjaan, Kabupaten Nganjuk

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 of 2004 provides broad autonomy to regional governments, including Nganjuk Regency, in financial management. Good financial performance is an indicator of the success of regional government administration and has a positive impact on regional development and community welfare. This research aims to analyze the financial performance of the Nganjuk district government with a focus on the ratio of regional income and expenditure. This analysis is relevant considering the potential of natural resources in Nganjukku Regency and the increasing community need for public services. From the research as many cases show that the analysis of the degree of decentralization of 16% in poor performance, the ratio of financial independence with very low performance, the ratio of expenditure growth of 3.46% in poor performance, the average operational expenditure with good performance, the average capital expenditure of 14.56% in good performance, and also the average direct and indirect expenditure of Nganjuk Regency is not good because direct expenditure is smaller than indirect expenditure. It is hoped that the research results will provide an overview of the financial management capacity of Nganjuk Regency and provide policy recommendations to improve regional fiscal performance.

Keywords: Regional financial performance, Revenue, Expenditure, Nganjuk district

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32/2004 memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk, untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal ini menuntut pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangannya dengan baik dan efisien. Salah satu

ukuran efektivitas pencapaian otonomi daerah adalah kinerja keuangan pemerintahan daerah. Kinerja yang baik bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan pertumbuhan daerah.

Tingkat keberhasilan yang dicapai dalam sektor keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan pengeluaran daerah disebut keuangan daerah. Sektor keuangan mencatat pendapatan dan pengeluaran daerah menggunakan ukuran-ukuran moneter yang ditetapkan oleh kebijakan atau undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2002), ada tiga tujuan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen keuangan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja pemerintah agar dapat fokus pada maksud dan tujuan program satuan kerja, yang pada akhirnya mendorong keberhasilan pemerintahan daerah. Mencapai tujuan dan sasaran program dan pada akhirnya meningkatkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Tingkatkan komunikasi dalam organisasi yang ada dan raih akuntabilitas publik

Pendapatan adalah total pendapatan moneter suatu daerah yang menambah modal keuangannya pada tahun anggaran, yang dibayarkan kepada pemerintah daerah dan harus dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Ada tiga jenis pendapatan: kesleuruhan pendapatan unik lokal berasal dari sumber ekonomi unik lokal. Dana kompensasi adalah sumber pendanaan dari pendapatan negara dan anggaran yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Dana tambahan dari dana bantuan dan dan dana pendamping pemerintah pusat dianggap sebagai pendapatan yang sah.

Selain itu, terdapat belanja daerah, yaitu seluruh pengeluaran kas daerah yang mengurangi modal keuangan tahun anggaran dan yang pembayarannya tidak dipungut oleh pemerintah daerah. Ada tiga kategori belanja, belanja organisasi lokal adalah belanja yang memberikan manfaat langsung bagi perusahaan, namun tidak bermanfaat bagi masyarakat lokal. Belanja layanan publik merupakan belanja yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Pengeluaran untuk bantuan keuangan dan bagi hasil berada di urutan terakhir. Selain itu, ada pinjaman, yang didefinisikan sebagai semua pendapatan dan pengeluaran yang dapat dibayar Kembali selama tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran diperoleh Kembali pada tahun fiskal berjalan atau tahun tahun fiskal berikutnya dan terutama digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran pemerintah daerah atau menutupi defisit anggaran.

Indikator-indikator ini merupakan indikator penting untuk mengukur status keuangan pemerintah daerah. Rasio ini dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan efisiensi penggunaan anggarannya, dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Otonomi daerah Kab. Nganjuk memberikan kontrol yang luas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun, mengelola keuangan secara efektif dan efisien merupakan tantangan

tersendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menitikberatkan pada rasio pendapatan dan belanja daerah. Dengan menganalisis hubungan-hubungan tersebut, kami berharap dapat memperjelas sejauh mana Kabupaten Nganjuk mampu mengelola keuangannya dan bagaimana hal ini mempengaruhi pembangunan daerah. Kajian ini relevan mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Nganjuk dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dari penelitian ini akan membantu pemerintah dalam mengembangkan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

METODE

Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk: Studi Kasus Rasio Pendapatan dan Belanja Daerah.” Karena tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi dan mengkarakterisasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan menghitung dan memeriksa sejumlah rasio keuangan daerah, maka pendekatan ini digunakan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nganjuk selama periode selama 5 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan menggunakan data keuangan daerah. Baik data statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Nganjuk maupun data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2019-2023 digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan:

1. Dokumentasi: mengumpulkan dan meninjau catatan laporan keuangan
2. Studi Literatur: mengumpulkan data tentang analisis keuangan daerah dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menggambarkan sejauh mana daerah dapat membiayai operasi daerahnya yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan asli daerah secara terbalik. Fakta bahwa pendapatan asli daerah meningkat seiring dengan besarnya desentralisasi berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Rumus analisis derajat desentralisasi yaitu:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kategorisasi skala interval untuk memastikan persyaratan rasio derajat desentralisasi:

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang

20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai proyek dan urusannya sendiri. Tingkat kemandirian adalah survei yang menunjukkan cara-cara pemerintah daerah membantu proyek pemerintah mereka sendiri. Dengan membandingkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan pendapatan asli daerah. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pola hubungan:

Persentase	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
00,00% - 25,00%	Rendah Sekali	Instruktif
25,01% - 50,00%	Rendah	Konsultatif
50,01% - 75,00%	Sedang	Partisipatif
>75%	Tinggi	Delegatif

Analisis Belanja Daerah

Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Th } t = \frac{\text{Belanja Th } t - \text{Belanja Th } (t-1)}{\text{Belanja Th } (t-1)} \times 100\%$$

Penilaian dalam analisis rasio pertumbuhan pendapatan:

1. Kinerja belanja baik ditunjukkan dengan Pertumbuhan belanja $\leq$ Pertumbuhan Pendapatan
2. Kinerja belanja kurang baik ditunjukkan dengan Pertumbuhan belanja $\geq$ Pertumbuhan pendapatan (Mahmud 2010-160)

Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja (BOTB)

Rasio belanja operasional yaitu perbandingan antara belanja operasional dan total belanja operasional dengan total belanja suatu daerah dalam satu periode tertentu. Belanja operasional adalah biaya yang rutin dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari pemerintahan,

seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya operasional lainnya. Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah memprioritaskan pendanaan biaya operasional. Dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Perbandingan belanja operasi mempengaruhi total belanja daerah, antara 60%-90%:

Kinerja belanja yang baik ditunjukkan dengan rasio BOTB $\leq 90\%$

Kinerja belanja operasional yang kurang baik ditunjukkan dengan rasio BOTB $\geq 90\%$.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (BMTB)

Total belanja modal suatu daerah dibagi dengan total belanja dikenal sebagai rasio belanja modal terhadap total belanja. Belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk investasi dalam asset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, dan lainnya.

$$\text{Rasio Belanja Modal Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio BMTB:

Rasio BMTB $> 5\%$. mengindikasikan belanja operasi baik

Rasio BMTB $< 5\%$. mengindikasikan belanja operasi kurang baik (Mahmudi, 2010:164-165)

Rasio Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap Total Belanja

Persentase dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk biaya langsung dan tidak langsung selama jangka waktu tertentu ditentukan oleh rasio belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL).

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Seharusnya Belanja Langsung $>$ dari Belanja Tidak Langsung, karena output kegiatan dipengaruhi oleh belanja langsung. Kriteria rasio:

Rasio Belanja Langsung $>$ Rasio Belanja Tidak langsung, berarti kinerja belanja langsung baik

Rasio Belanja Langsung $\leq$ Rasio Belanja Tidak Langsung, berarti kinerja belanja langsung kurang baik.

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Kab.Nganjuk Tahun 2019-2023

TAHUN	PAD	TOTAL PENDAPATAN	DD	KINERJA
2019	368.261.735,28	2.993.576.604,06	12%	Kurang
2020	403.956.230,72	2.404.988.975,99	17%	Kurang
2021	476.323.170,94	2.569.781.268,89	19%	Kurang
2022	445.589.935,50	2.501.196.777,62	18%	Kurang
2023	402.455.177,76	2.687.294.591,28	15%	Kurang
RATA-RATA	419.317.250,04	2.631.367.643,57	16%	Kurang

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab.Nganjuk Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 1. Dapat lihat bahwa pada kurun waktu 5 tahun yaitu ditahun 2019-2023 tingkat desentralisasi Kab. Nganjuk berada pada presentase yang kurang. Pada tahun 2019 presentasenya berada pada nilai 12%, ini merupakan presentase terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dan ditahun 2020 presentasenya mengalami kenaikan sebanyak 17% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebanyak 19% ini menjadi kenaikan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Ini disebabkan karena adanya peningkatan wewenang dan alokasi anggaran daerah untuk menangani kebutuhan mendesak selama pandemi covid-19. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1% yaitu menjadi 18%. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2023 presentasenya mengalami penurunan lagi yaitu berada pada presentase 15%. Dengan rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi Kab. Nganjuk sebanyak 16% selama di tahun 2019-2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kab. Nganjuk relatif rendah dibandingkan total pendapatan daerah sehingga kurang berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan daerah di Kab. Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Nganjuk masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pembiayaan operasional dan juga dalam program-program publik yang diselenggarakannya.

Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Kab. Nganjuk Tahun 2019-2023

TAHUN	PAD	PENDAPATAN EKSTERNAL	KK	KINERJA
2019	368.261.735,28	2.625.254.868,78	14%	RENDAH SEKALI
2020	403.956.230,72	20.010.032.745,27	2%	RENDAH SEKALI

2021	476.323.170,94	2.093.458.097,95	23%	RENDAH SEKALI
2022	445.589.935,50	2.055.606.842,11	22%	RENDAH SEKALI
2023	402.455.177,76	2.284.839.413,53	18%	RENDAH SEKALI
RATA-RATA	419.317.250,04	5.813.838.393,53	16%	RENDAH SEKALI

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Nganjuk Tahun 2019-2023

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan Kab. Nganjuk, seperti yang dihitung dalam tabel 2 pada tahun 2019-2023 berada pada tingkat yang rendah sekali. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dari presentase angka 14% menjadi 2%. Hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah menurun akibat aktivitas ekonomi yang tidak stabil selama pandemi covid-19. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 23% dan ini merupakan peningkatan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Ditahun 2022 sedikit mengalami penurunan yaitu dengan presentase 22%. Dan ditahun 2023 mengalami penurunan lagi sebanyak 4% yaitu dari 22% menjadi 18%. Nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan Kab. Nganjuk pada tahun 2019-2023 dengan presentase 16% menunjukkan bahwa kinerja keuangan rendah sekali. Hal ini menunjukkan Kab. Nganjuk memiliki ketergantungan yang besar pada aliran dana pemerintah pusat.

Analisis Belanja Daerah

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Belanja Kab. Nganjuk Tahun 2019-2023

TAHUN	BELANJA	PERTUMBUHAN PENDAPATAN	PERTUMBUHAN BELANJA	KINERJA
2018	2.312.797.118,68	-	-	-
2019	2.541.996.619,52	8,93%	9,91%	KURANG BAIK
2020	2.324.723.593,21	-19,66%	-8,55%	KURANG BAIK
2021	2.346.495.973,90	6,85%	0,94%	BAIK
2022	2.665.239.993,16	-2,67%	13,58%	KURANG BAIK
2023	2.703.427.165,19	7,44%	1,43%	BAIK
RATA-RATA	2.482.446.743,94	0,18%	3,46%	KURANG BAIK

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Nganjuk Tahun 2019-2023

Menurut tabel 3. Dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2019-2023 berada pada presentase yang kurang baik. Pada tahun 2019 presentase pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja adalah 8.93% dan 9.91%. Dan ditahun 2020 mengalami penurunan yang

sangat signifikan sampai bernilai minus, dengan presentase pertumbuhan pendapatan -19,66% dan pertumbuhan belanja -8.55%. Hal ini disebabkan oleh efek pandemi covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi di Kab. Nganjuk, banyak usaha kecil dan menengah yang gulung tikar menyebabkan lapangan kerja menjadi berkurang dan pendapat masyarakat juga berkurang. Lalu ditahun 2021-2022 pertumbuhan belanja terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, untuk pertumbuhan pendapatan ditahun 2022 berada pada presentase yang minus yaitu di angka -2,67%. Dan ditahun 2023 presentase pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja semakin baik. Pada data diatas menunjukan bahwa pertumbuhan belanja rata-rata buruk karena pertumbuhan pendapatan lebih kecil dibandingkan pertumbuhan belanja, kecuali di tahun 2021 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Nganjuk belum mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan atau pertumbuhan belanja yang signifikan.

Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja (BOTB)

Tabel 4. Rasio BOTB Kab.Nganjuk Tahun 2019-2023

TAHUN	BELANJA OPERASI	TOTAL BELANJA	BOTB	KINERJA
2019	1.688.765.660,94	2.541.996.619,52	66%	BAIK
2020	1.579.136.520,24	2.324.723.593,21	68%	BAIK
2021	1.560.551.565,35	2.346.495.973,90	67%	BAIK
2022	1.785.994.641,06	2.665.239.993,16	67%	BAIK
2023	1.854.533.486,75	2.703.427.165,19	69%	BAIK
RATA-RATA	1.693.796.374,87	2.516.376.669,00	67%	BAIK

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab.Nganjuk Tahun 2019-2023

Pada tabel 4. Menunjukkan bahwa rasio belanja operasional terhadap total belanja Kab. Nganjuk di tahun 2019 sampai tahun 2023 memiliki kinerja yang baik. Pada tahun 2019 persentasenya berada di angka 66% yang menunjukkan kinerja pada tahun itu baik. Dan ditahun 2020 persentasenya naik 2% yaitu menjadi 68%, hal ini terjadi karena pemerintah Kab. Nganjuk meningkatkan kapasitas penyediaan layanan kesehatan, karena pandemi covid-19 volume pasien yang mengalami peningkatan. Sedangkan ditahun 2021-2022 mengalami penurunan yaitu berada dipersentase 67%. Dan ditahun 2023 mengalami kenaikan lagi yaitu sebanyak 69% dan ini merupakan kenaikan tertinggi selama 2019-2023. Rasio belanja operasional terhadap total belanja Kab. Nganjuk memiliki rata-rata 67% ini menunjukkan kinerja yang baik. Dengan data diatas menunjukkan bahwa belanja operasional Kab. Nganjuk telah mencapai tingkat yang signifikan dari total belanja dan dalam kinerja pengelolaan keuangan telah berjalan secara efektif.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (BMTB)

Tabel 5. Rasio BMTB Kab. Nganjuk Tahun 2019-2023

TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	BMTB	KINERJA
2019	435.247.383,92	2.541.996.619,52	17,12%	BAIK
2020	236.246.600,31	2.324.723.593,21	10,16%	BAIK
2021	347.568.250,98	2.346.495.973,90	14,81%	BAIK
2022	445.280.815,78	2.665.239.993,16	16,71%	BAIK
2023	377.733.309,83	2.703.427.165,19	13,97%	BAIK
RATA-RATA	368.415.272,16	2.516.376.669,00	14,56%	BAIK

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Nganjuk Tahun 2019-2023

Pada tabel 5. Data diatas menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja Kab. Nganjuk berada dipresentase kinerja yang baik. Meskipun presentase setiap tahunnya mengalami peningkatan dan juga penurunan yang cukup signifikan. Seperti ditahun 2019 presentasinya yaitu 17.12% ini merupakan presentase tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 mengalami sebuah penurunan yang cukup banyak yaitu presentasinya menjadi 10.16% ini menjadi presentase terendah selama 2019-2023. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19, karena pada tahun tersebut pemerintah lebih fokus pada pembiayaan belanja operasional terutama disektor kesehatan. Dan ditahun berikutnya yaitu tahun 2021-2022 terus mengalami kenaikan karena pertumbuhan ekonomi di Kab. Ngnajuk mulai pulih, sehingga ditahun 2021 presentasinya mengalami kenaikan sebanyak 4,65% yaitu menjadi 14,81% dan ditahun 2022 presentasinya berada diangka 16,71%. Namun ditahun 2023 presentasinya mengalami penurunan yaitu berada dipresentase 13.97%. Walaupun presentase selama tahun 2019-2023 mengalami naik turun, namun rasio belanja modal terhadap total belanja Kab. Nganjuk memperlihatkan kinerja yang baik. Dengan presentase nilai rata-rata sebanyak 14,56%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir Kab. Nganjuk telah berhasil mengalokasikan sejumlah besar anggaran untuk investasi jangka panjang melalui belanja modal.

Rasio Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap Total Belanja

Tabel 6. Rasio Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Kab. Nganjuk Tahun 2019-2023

TAHUN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA	BL	BTL	KINERJA
-------	------------------	------------------------	---------------	----	-----	---------

2019	1.134.548.848,28	1.407.447.771,24	2.541.996.619,52	45%	55%	KURANG BAIK
2020	857.660.668,53	1.467.062.924,68	2.324.723.593,21	37%	63%	KURANG BAIK
2021	895.711.401,44	1.450.784.572,46	2.346.495.973,90	38%	62%	KURANG BAIK
2022	1.167.657.685,59	1.497.582.307,57	2.665.239.993,16	44%	56%	KURANG BAIK
2023	1.119.508.153,00	1.583.919.012,19	2.703.427.165,19	41%	59%	KURANG BAIK
RATA- RATA	1.035.017.351,37	1.481.359.317,63	2.516.376.669,00	41%	59%	KURANG BAIK

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Nganjuk Tahun 2019-2023

Pada tabel 6. Menunjukkan bahwa rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung Kab. Nganjuk selama tahun 2019 sampai tahun 2023 memiliki kinerja yang kurang baik. Pada tahun 2019 presentase belanja langsungnya adalah 45% dan belanja tidak langsungnya 55%. Dan ditahun 2020 rasio belanja langsungnya mengalami penurunan yaitu diangka 37%, sedangkan rasio belanja tidak langsungnya mengalami kenaikan yaitu 63%. Ditahun berikutnya yaitu tahun 2021 rasio belanja langsungnya adalah 38% dan rasio belanja tidak langsungnya 62%. Ditahun 2020 dan 2021 rasio belanja langsungnya mengalami penurunan dan rasio belanja tidak langsungnya mengalami kenaikan, hal ini diakibatkan karena adanya pandemi covid-19, oleh karena itu pemerintah lebih fokus ke anggaran belanja tidak langsung untuk mendukung pemulihan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak covid seperti mengadakan bantuan sosial. Lalu ditahun 2022 rasio belanja langsungnya mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu 44%, dan berbanding dengan rasio belanja tidak langsungnya mengalami penurunan yaitu 56%. Dan ditahun terakhir, yaitu tahun 2023 rasio belanja langsungnya mengalami penurunan lagi yaitu dengan presentase 41%, sedangkan rasio belanja tidak langsungnya mengalami kenaikan yaitu 59%. Dari hasil perhitungan menunjukkan nilai rasio pengeluaran langsung lebih kecil dibandingkan dengan rasio pengeluaran tidak langsung. Dengan nilai rata-rata rasio belanja langsung sebanyak 41% dan belanja tidak langsungnya sebanyak 59%. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Nganjuk selama kurun waktu 5 tahun pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran untuk belanja yang tidak langsung, sehingga dana yang ada tidak digunakan dengan benar-benar efektif.

KESIMPULAN

Temuan dari studi ini dapat disimpulkan, yaitu: 1) Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat desentralisasi yang lebih rendah, dengan rata-rata 16% berdasarkan analisis rata-rata periode 2019-2023. 2) Berdasarkan rata-rata kemandirian keuangan Kab. Nganjuk dari tahun 2019-2023 rendah sekali, menunjukkan tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap pemerintah pusat. 3) Berdasarkan rata-rata rasio pertumbuhan belanja Kab. Nganjuk dari tahun 2019-2023 adalah kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Nganjuk belum mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan atau pertumbuhan belanja yang signifikan. 4) Dilihat dari rata-rata belanja operasional Kab. Nganjuk tahun 2019-2023 adalah baik yang menunjukkan bahwa belanja operasional Kab. Nganjuk telah mencapai tingkat yang signifikan dari total belanja dan efektif dalam pengelolaan keuangan. 5) Berdasarkan rata-rata belanja modal Kab. Nganjuk adalah baik yaitu 14,56%. 6) Rata-rata belanja langsung dan tidak langsung Kab. Nganjuk kurang baik karena belanja langsung lebih kecil daripada belanja tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Delima, Nadya Ayu, Taufiq Marwa, dan Anna Yulianita. (2016). Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14 (2): 75. <https://jep.ejournal.unsri.ac.id>.
- Fathah, Rigel Nurul. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8 (1): 37—38. <https://www.ebbank.stiebbank.ac.id>.
- Fakhruddin, Imam, Billy Yanis Saputra, dan Firdaus. (2024). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis. *Scientific Journal Of Economics, Management, Business, and Accounting*, 14(1): 5. <https://e-journal.uniflor.ac.id>.
- Hakiki, Doni, Tumija, dan Ika Agustina. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(1): 58. <https://ejournal.ipdn.ac.id>.
- Hidayat, Rahmat, Runi Paga'ga, dan Ningsi. (2022). Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 2(3): 210. <https://journal.sinov.id>.
- Irnawati, Saripuddin D, dan Zainal Abidin. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3): 410—411.

<https://e-jurnal.nobel.ac.id>.

- Marlianita, Yulistiani dan Suji Abdullah Saleh. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1): 27. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>.
- Perangin-Angin, Puspita Geatri Br, Erisma Adi Natalian, dan RismaWira Bharata. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3): 177—181. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id>.
- Riswati dan Yazid Bukhori. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10 (1): 46—53. <https://ejournal.ipdn.ac.id>.
- Runjung, R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma, Anindita Primastuti, dan Riswati. (2022). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9 (2): 100—109. <https://ejournal.ipdn.ac.id>.
- Selvi, Natalia Mega dan Mega Tunjung Hapsari. (2023). Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi Covid-19 (Tahun 2017-2022). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing*, 4(1): 207—2013. <https://publikasi.dinus.ac.id>.
- Susanti, Annis, Septa Riadi, dan Deviana Sari. (2022). Analisis Rasio Keserasian Belanja Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai*. 8(1): 15. <https://jurnal.saburai.id>.